



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bapperida menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 206);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Renja Inspektorat;
 - d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - e. Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata;
 - i. Renja Dinas Kesehatan;
 - j. Renja Dinas Sosial;
 - k. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - l. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

- n. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Renja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- p. Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian;
- q. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- r. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. Renja Dinas Pekerjaan Umum;
- t. Renja Dinas Perhubungan;
- u. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- v. Renja Dinas Pertanian;
- w. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan;
- x. Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
- y. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- z. Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
- aa. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Renja Kecamatan Wonogiri;
- dd. Renja Kecamatan Selogiri;
- ee. Renja Kecamatan Nguntoronadi;
- ff. Renja Kecamatan Ngadirojo;
- gg. Renja Kecamatan Wuryantoro;
- hh. Renja Kecamatan Manyaran;
- ii. Renja Kecamatan Baturetno;
- jj. Renja Kecamatan Giriwoyo;
- kk. Renja Kecamatan Jatisrono;
- ll. Renja Kecamatan Jatiroto;
- mm. Renja Kecamatan Eromoko;
- nn. Renja Kecamatan Pracimantoro;
- oo. Renja Kecamatan Purwantoro;
- pp. Renja Kecamatan Kismantoro;
- qq. Renja Kecamatan Batuwarno;
- rr. Renja Kecamatan Karangtengah;
- ss. Renja Kecamatan Giritontro;
- tt. Renja Kecamatan Paranggupito;
- uu. Renja Kecamatan Jatipurno;
- vv. Renja Kecamatan Slogohimo;
- ww. Renja Kecamatan Tirtomoyo;
- xx. Renja Kecamatan Sidoharjo;
- yy. Renja Kecamatan Girimarto;
- zz. Renja Kecamatan Bulukerto; dan
- aaa. Renja Kecamatan Puhpelem.

(3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI WONOGIRI,
ttd
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
ttd
FX. PRANATA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F.MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007



PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA KERJA RENJA

INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus diturunkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahunan. Renja-PD Inspektorat berfungsi sebagai panduan operasional satu tahun anggaran, menjabarkan visi dan misi daerah serta Renstra Perangkat Daerah ke dalam program dan kegiatan prioritas, sasaran, target kinerja, anggaran, serta mekanisme pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri 2025– 2029. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala

Daerah, serta untuk menangani isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan yang selanjutnya dibahas dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Wonogiri dan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Wonogiri bidang Pengawasan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 61);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);
24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2026;
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 103).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah :

1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2026 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2026. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Pedoman dan penentu arah bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2026;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan taktis operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026;
- c. Menyiapkan rencana program Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2026;
- d. Menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2026;

- e. Menyiapkan rencana sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2026;
- f. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri; dan
- g. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD dan keterkaitan Dokumen Perencanaan yang lain.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang mengatur tentang SOTK, kewenangan organisasi, serta pedoman penyusunan perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan susunan garis besar isi dan pokok bahasan Renja OPD.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Periode 2021-2026

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya yang selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD (baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya), serta menyajikan tabel rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatifnya untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Periode 2021 – 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2024 dengan capaian kinerja yang disesuaikan dengan dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 total anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 8.434.046.856,00 yang ditujukan untuk mendukung 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 7.282.653.749,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 86,35%. Sedangkan pencapaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2025 belum dapat dilihat capaiannya dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri periode 2021 – 2026.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024
Kabupaten Wonorejo

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	100%	100%	98,41%	98,41%	100%	100%	100%
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	8	3	3	100%	3	14	82%
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2	1	1	100%	1	4	80%
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100%	100%	100%	94,3%	94,3%	100%	100%	100%
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	41	41	34	83%	41	41	100%
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	3	1	1	100%	1	5	83%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	80	41	13	13	100%	13	67	84%
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	0	0	0%	0	1	20%
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	7	5	5	100%	5	17	170%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)// Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	2	0	0	0%	0	2	20%
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8	8	8	8	100%	8	8	100%
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120	48	24	24	100%	24	96	80%
6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	64	36	12	16	133%	12	60	93%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	2	1	1	100%	1	4	80%
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	315	165	50	50	100%	50	265	84%
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	10	0	0	0%	0	10	20%
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	3	1	1	100%	1	5	83%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	2	1	1	0%	1	4	67%
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	36	12	12	100%	12	60	83%
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	92	52	20	20	100%	20	92	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	80	15	15	100%	15	110	88%
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	3	2	2	100%	2	7	77%
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0%	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	0	2	2	0%	0	2	8%
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	10	6	6	0%	6	22	73%
6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	4	0	0	0%	3	7	140%
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	36	12	12	100%	12	60	83%
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	36	12	12	100%	12	60	83%
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	36	12	12	100%	12	60	83%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	4	2	2	100%	2	8	80%
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102	50	14	14	100%	11	75	73%
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	6	3	3	100%	3	12	75%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49	19	10	10	100%	10	39	80%
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	3	1	1	100%	1	5	83%
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	1	0	0	0%	0	1	20%
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	0	0	0%	0	1	20%
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100%	100%	100%	109,09%	109,09%	100%	100%	100%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	815	402	135	136	101%	136	674	83%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	38	30	8	9	112%	9	47	123%
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25	10	5	5	100%	5	20	80%
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	324	163	53	53	100%	53	267	82%
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	189	87	30	30	100%	30	147	77%
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	2	1	1	100%	1	4	80%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	228	107	37	37	100%	37	181	79%
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	587	312	99	117	118,18%	101	530	90%
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	4	2	2	100%	2	8	80%
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	577	308	97	115	118,56%	99	522	90%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase realiasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	66	36	12	12	100%	12	60	90%
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16	16	2	2	100%	2	19	118%
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	50	20	10	10	100%	10	40	80%
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	55	27	9	9	100%	9	45	81%
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	53	53	53	100%	53	53	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)// Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	53	53	53	100%	53	53	100%
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	5	5	5	100%	5	5	100%
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	53	53	53	100%	53	53	100%

Pada tabel 2.1 yang tersaji di atas, dapat diuraikan penjelasannya bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 didukung dengan 3 program utama dengan capaiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase tertib pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Di tahun 2024, program ini terealisasi 98,41% seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.1 jika pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terealisasi 100% karena targetnya 41 orang/bulan namun di tahun 2024 mengalami penurunan jumlah pegawai karena mutasi dan pensiun sehingga tidak dapat tercapai 100%.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2024 sebesar Rp. 7.669.040.806,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.559.869.959,00 (85,54%) selama satu tahun anggaran 2024.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 8 kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Di tahun 2024, kegiatan ini didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 3 dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA dan DPA) yang telah terealisasi sesuai targetnya dengan capaian kinerjanya 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 960.000,00 dan telah terserap sebesar Rp. 814.000,00 (84,79%) selama satu tahun anggaran 2024.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang difokuskan untuk penyusunan dokumen laporan kinerja dengan outputnya

adalah 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah terealisasi sesuai targetnya dengan capaian kinerjanya 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 345.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 315.000 (91,3%) selama satu tahun anggaran 2024.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

Selain terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output dari kegiatan ini adalah 13 laporan keuangan (12 laporan keuangan bulanan dan 1 laporan keuangan semester I karena laporan keuangan semester II atau akhir tahun sudah masuk dalam laporan bulanan di Bulan Desember). Namun realisasi atas kegiatan ini adalah belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pada Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 41 orang / bulan tidak terpenuhi karena adanya mutasi dan pensiun pegawai di Inspektorat Tahun Anggaran 2024 sehingga persentase capaian kegiatan ini adalah 87,27%.

Alokasi anggaran dana untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 6.718.735.307,00 dan telah terserap sebesar Rp. 5.676.280.211,00 (84,48%).

c. Administrasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan outputnya 5 dokumen (1 dokumen terkait perencanaan BMD, 2 dokumen terkait pengamanan BMD dan 2 dokumen atas rekonsiliasi laporan BMD). Kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 999.940,00 dan telah terserap sebesar Rp 963.540,00 (96,36%).

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 5 sub kegiatan yang difokuskan selain untuk administrasi kepegawaian seperti administrasi kenaikan pangkat jabatan dan lainnya, kegiatan ini juga untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai

berdasarkan tugas dan fungsinya melalui berbagai bimtek dan diklat. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 187.199.530,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 167.820.735,00 (89,65%).

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 10 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 4) Penyediaan bahan logistik kantor;
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 7) Fasilitasi kunjungan tamu;
- 8) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 9) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD; dan
- 10) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

Kegiatan ini difokuskan untuk penyediaan terhadap kebutuhan administrasi umum pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor seperti yang telah diuraikan ke dalam beberapa sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 221.135.100,00 dan telah terserap sebesar Rp. 217.428.018,00 (98,32%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
- 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan kantor seperti materai (surat menyurat), peralatan perlengkapan kantor dan terbayarnya jasa tenaga kontrak dan internet, air dan listrik dan yang lainnya seperti yang diuraikan ke dalam sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini adalah

100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 244.878.300,00 dan telah terserap sebesar Rp. 229.865.088,00 (93,87%).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 5 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- 3) Pemeliharaan mebel;
- 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- 5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dinas (operasional dan lapangan, perorangan dan jabatan), gedung dan sarana prasarana pendukungnya, serta pemeliharaan terhadap mebel yang terdapat di kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan terhadap BMD (kendaraan dinas, gedung dan mebel). Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 250.285.729,00 dan telah terserap sebesar Rp. 222.883.367,00 (89,05%).

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini difokuskan untuk Belanja Modal dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan di Inspektorat dan capaian kegiatan ini adalah 100% dengan telah terealisasinya pengadaan barang berupa printer dan laptop dengan total anggaran Rp. 44.501.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 43.500.000,00 (97,75%).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan ini adalah persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT dengan target

kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan pengawasan dalam satu tahun anggaran 2024.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan di tahun 2024 sebesar Rp. 440.444.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 404.235.964,00 (91,78%). Kemudian, untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan, diimplementasikan melalui 2 kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal di tahun 2024 sebesar Rp. 271.244.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 244.686.850,00 (90,02%).

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, diimplementasikan melalui 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan untuk pengawasan terkait kinerja pemerintah daerah. Output dari sub kegiatan ini adalah 8 laporan atas audit kinerja program strategis selama satu tahun anggaran. Realisasi atas kegiatan ini 112%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 38.800.000,00 yang telah terserap sebesar Rp. 33.522.200,00 (86,4%).

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan untuk asistensi terkait pengawasan keuangan seperti asistensi penyusunan LKPD, pendampingan pemeriksaan BPK Pendahuluan dan Terinci atas kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan targetnya 5 laporan yang telah tercapai 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 26.000.000,00 yang telah terserap sebesar Rp 24.650.248,00 (94,81%).

3) Reviu Laporan Kinerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap laporan kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) untuk meningkatkan pemahaman OPD atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemahaman yang lebih baik, ditunjukkan dengan skor hasil evaluasi yang tinggi sehingga laporan atas kinerja OPD dapat diyakini akuntabilitasnya. Hal

tersebut diharapkan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan akuntabilitas yang tinggi pada setiap OPD.

Pada tahun 2024, output sub kegiatan revidi laporan kinerja ditargetkan sebanyak 53 laporan (25 Kecamatan dan 28 Dinas/Badan) dan telah terealisasi sesuai targetnya 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 7.500.000,00 yang telah terserap sebesar Rp 7.137.000,00 (95,16%).

4) Revidi Laporan Keuangan

Sub kegiatan revidi laporan keuangan dengan targetnya 1 laporan yang telah tercapai 100%, bertujuan agar laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat dipertanggungjawabkan dalam penyajiannya. Sub kegiatan ini terkait erat dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Sampai dengan saat ini LKPD Kabupaten Wonogiri berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 tahun berturut-turut (2016-2024). Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 7.575.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 7.344.000,00 (96,95%).

5) Pengawasan Desa

Pengawasan Desa adalah pengawasan internal secara berkala pada Pemerintah Desa. Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan serta pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa terhadap Pemerintah Desa. Output sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengawasan atas Desa. Tahun 2024, target kinerja atas sub kegiatan ini adalah 30 laporan dan telah terealisasi sebanyak 30 laporan (100%). Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp 112.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 94.917.472,00 (84,75%).

6) Kerjasama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini memfasilitasi adanya kerjasama internal dalam hal pengawasan dengan target 1 laporan yang telah tercapai 100%. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kerjasama antar bidang untuk revidi telaah intern. Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar

Rp 1.000.000,00 dengan penyerapan sebesar Rp 848.000,00 (84,8%).

7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan pengawasan ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan dengan melakukan monitoring dan pemantauan tindak lanjut. Target sub kegiatan ini di tahun 2024 adalah 37 laporan yang telah tercapai 100% dengan rincian 2 laporan semesteran ke Provinsi (Ikhtisar Pengawasan Semester I dan II), 1 laporan penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), 4 laporan tindak lanjut pemeriksaan Provinsi dan BPK RI Semester I dan II serta 30 laporan tindak lanjut hasil rekomendasi APIP. Anggaran yang disediakan untuk kelancaran sub kegiatan ini sebesar Rp 78.369.900,00 dan telah terserap sebesar Rp 76.267.930,00 (97,32%).

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di tahun 2023 sebesar Rp 169.200.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 159.549.114,00 (94,3%). Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, diimplementasikan melalui 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian daerah bertujuan untuk melakukan monitoring/pemantauan terhadap kasus finansial yang menyebabkan kerugian daerah yang dilaporkan per semester dengan targetnya 2 laporan yang telah tercapai 100%. Kemudian untuk mendukung kelancaran sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 940.000,00 (94%).

2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan rutin yang telah dilakukan dalam sub kegiatan pengawasan yang lainnya contohnya penanganan kasus/aduan, monitoring evaluasi

atas perencanaan gender (PPRG), reuiu DAK (Dana Aggaran Khusus) secara Fisik dan yang lainnya yang tidak bisa dikategorikan ke dalam sub kegiatan pengawasan rutin yang lainnya dengan targetnya 97 laporan yang telah terealisasi 115 laporan dengan capaiannya 118,56%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 168.200.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 158.609.114,00 (94,3%).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengawasan yang terangkum dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan telah terealisasi sesuai dengan targetnya pada semua Sub Kegiatannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan yang menjadikan kendala dalam pencapaian targetnya. Semua aktivitas di dalamnya masih berjalan sama seperti tahun sebelumnya di tahun 2023 dengan target yang sama pula sehingga masih dapat tercapai sesuai rencana targetnya.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program ini adalah persentase realisasi Reformasi Birokrasi komponen penguatan pengawasan dengan target 100%. Tahun 2024, program ini terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di tahun 2024 sebesar Rp 324.561.150,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 318.547.826,00 (98,15%).

Untuk mendukung program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, diimplementasikan melalui 2 kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2024 sebesar Rp 22.445.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 22.044.000,00 (98,21%). Dalam mendukung kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2024, diimplementasikan melalui 2 sub kegiatan yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bertujuan untuk melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan melalui penyusunan Jakwas (Kebijakan Pengawasan) dan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang diikuti dengan Rapat Operasional (RO) yang dilaksanakan rutin setiap bulan untuk mengawal seluruh kegiatan pengawasan dalam PKPT setiap bulannya dengan target sub kegiatan 2 laporan PKPT yang telah tercapai sesuai targetnya. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 2.445.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.359.500,00 (96,5%).

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi terkait kebijakan pengawasan maupun rapat monitoring atas kinerja pengawasan triwulanan dengan targetnya 10 laporan yang telah tercapai 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 20.000.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 19.684.500,00 (98,42%).

b. Pendampingan dan Asistensi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2024 sebesar Rp 302.116.150,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 296.503.826,00 (98,14%). Dalam mendukung kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2024, diimplementasikan melalui 4 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan pada pengawasan atas urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh auditor Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) melalui aktivitas pendampingan, asistensi dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan outputnya 2 laporan yaitu laporan pendampingan asistensi atas penilaian mandiri SPIP dan pendampingan asistensi atas penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada semua perangkat daerah. Realisasi sub kegiatan ini ditahun 2024 adalah 100% dengan

dukungan anggaran sebesar Rp 28.259.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 27.759.420,00 (98,23%).

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi atas penilaian Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Tahun 2024, sub kegiatan ini ditargetkan dengan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi pada 53 Perangkat Daerah dan telah terealisasi sebesar 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 9.940.000,00 dan telah terserap sebesar Rp 9.592.000,00 (96,5%).

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Beberapa aktivitas sebagai implementasi sub kegiatan ini adalah :

- a) Pembangunan ZI (Zona Integritas);
- b) MCP (*Monitoring Center for Prevention*);
- c) Pengendalian Gratifikasi;
- d) Saber Pungli; dan
- e) Survei Penilaian Integritas (SPI).

Tahun 2024, target kinerja sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat terealisasi 100% melalui 5 aktivitas pendukungnya (ZI, MCP, Saber Pungli, Gratifikasi dan SPI) dengan outputnya 5 kegiatan sesuai dengan yang telah ditargetkan di tahun 2024 dengan dukungan anggaran sebesar Rp 260.917.150,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 256.659.206,00 (98,37%).

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini difokuskan pada pendampingan, asistensi dan verifikasi atas pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara /LHKASN pada 53 perangkat daerah. Realisasi atas sub kegiatan ini di tahun 2024 adalah 100%.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua Sub Kegiatan yang mendukung Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah tercapai sesuai targetnya

karena secara realisasinya terlaksana sesuai rencananya di tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta seluruh program dan kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonogiri maupun dari Dana Alokasi Khusus. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi, reviu, pendampingan dan asistensi.

Kemudian untuk analisis kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel 2.2. Hal ini dikarenakan realisasi atas capaian kinerja berdasarkan Renstra Baru periode 2025-2029 belum tersedia data realisasinya di tahun 2025 untuk dilakukan analisis capaian kinerja pelayanannya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
INDIKATOR TUJUAN												
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – (IKK)	-	√ (IKK dan IKU)	3	3	3	3	2+	3	3	3	
2	Nilai Kematangan Organisasi	-	√ (IKU)	43	43	43	43	43	42	38	43	
3	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	-	√ (IKU)	n/a	n/a	2,5	3	n/a	n/a	3,023	3,025	Perubahan IKU 2024, penambahan indikator MRI
INDIKATOR SASARAN												
1	Jumlah Unit Kerja/ Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun	-	√ (IKU)	1	0	n/a	n/a	1	0	n/a	n/a	Perubahan IKU 2024, Indikator dihilangkan
2	Indeks Integritas Daerah	-	√ (IKU)	65	80,85	n/a	n/a	80,84	81,20	n/a	n/a	Perubahan IKU 2024, Indikator dihilangkan
3	Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas	-	√ (IKU)	60	n/a	n/a	n/a	49	n/a	n/a	n/a	Perubahan IKU 2024, Indikator dihilangkan
4	Level Maturitas SPIP-(IKK)	-	√ (IKK dan IKU)	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas	-	√ (IKU)	60	100	n/a	n/a	92,45	100	n/a	n/a	Perubahan IKU 2024, Indikator dihilangkan
No	Indikator	SPM/	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan

		Standar Nasional										analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP	-	√ (IKU)	95	95	n/a	n/a	98,9	98,9	n/a	n/a	Perubahan IKU 2024, Indikator dihilangkan
7	Nilai SAKIP Inspektorat	-	√ (IKU)	80	81	82	83	80,06	71,96	80,25	80,25	
8	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	-	√ (IKU)	82	87	88,5	88,5	67,25	77,39	82,46	82,46	
9	Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	-	√ (IKU)	1	2	3	4	1	2	3	4	
10	Jumlah Inovasi Inspektorat	-	√ (IKU)	1	1	0	0	1	1	0	0	
11	IKM Inspektorat	-	√ (IKU)	84	85	85	86	84,52	85,82	85,9	86	

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah maka ditentukan 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu : Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Maturitas SPIP pengukurannya adalah berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor PE.09.03/S-543/D3/04/20 tanggal 31 Desember 2024 diperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,161 (Level 3). Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman akan SPIP, Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan Evaluasi SPIP dan berkoordinasi secara aktif dengan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kabupaten serta menjalin komunikasi dengan BPKP selaku Pembina SPIP. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Wonogiri senantiasa membuka pintu konsultasi dan koordinasi.

Ukuran capaian atas Kapabilitas APIP adalah berdasarkan Hasil Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan metode *Internal Audit Capability Models* (IACM). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Nomor PE.09.03/LHP-333/PW11/6/2024, Tanggal 23 Agustus 2024 diperoleh skor Kapabilitas APIP 3,02 (Level 3) dengan hasilnya bahwa dari 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berhasil pada posisi Level 3.

Kemudian berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri diperoleh 7 indikator (Tabel 2.2, Indikator Tujuan nomor 1 dan Indikator Sasaran nomor 1 s.d 6) seperti tabel 2.2 di atas dengan 2 indikator telah diuraikan pada paragraf di atas. Namun dalam perkembangannya di Triwulan II Tahun 2024 sebagai langkah tindak lanjut atas evaluasi RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 serta rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 maka disusun Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang memberikan dampak perubahan indikator tujuan dan sasaran pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri seperti yang telah ditampilkan pada Tabel 2.2 (Indikator Tujuan nomor 1,2 dan 3 serta Indikator Sasaran nomor 4 dan 7 s.d 11) terkait Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 berdasarkan Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri tanggal 6 Juni 2024.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Tuntutan untuk Adaptif dan Responsif terhadap Regulasi yang Semakin Dinamis.

Perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat maupun daerah menuntut Inspektorat untuk mampu meningkatkan fleksibilitas dalam adaptasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Inspektorat harus memastikan setiap perubahan kebijakan atau peraturan diterapkan secara efektif di seluruh perangkat daerah. Namun, tuntutan untuk adaptif dan responsif terhadap regulasi yang dinamis juga membawa risiko. Salah satu risiko utamanya adalah keterlambatan dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan regulasi di seluruh perangkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan dengan peraturan terbaru. Selain itu, ada risiko ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi perubahan kebijakan, baik karena kurangnya kompetensi atau kurangnya pelatihan yang memadai. Risiko lain yang mungkin muncul adalah potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di lapangan, yang bisa menimbulkan

kesalahpahaman atau kesalahan dalam pelaksanaan program. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu memperkuat sistem monitoring terhadap setiap perubahan regulasi dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi secara berkala untuk memastikan seluruh pegawai dan perangkat daerah memahami dan menerapkan kebijakan dengan benar. Selain itu, penerapan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran informasi terkait regulasi terbaru dan memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah, sehingga adaptasi terhadap perubahan regulasi bisa lebih cepat dan akurat.

2. Tuntutan Masyarakat terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Keterbukaan Informasi.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, Inspektorat harus mampu mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola yang baik dan sesuai dengan harapan publik. Ini mencakup upaya pencegahan KKN dan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Namun, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi juga membawa sejumlah risiko. Salah satunya adalah risiko ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam penyampaian informasi publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, terdapat risiko resistensi dari beberapa perangkat daerah dalam membuka akses informasi yang dianggap sensitif atau kurang mendukung kepentingan tertentu. Potensi manipulasi data atau informasi juga menjadi ancaman yang dapat merusak akuntabilitas serta citra pemerintah daerah. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, Inspektorat perlu mendorong implementasi sistem pengelolaan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, disertai dengan pedoman dan aturan yang jelas tentang batasan keterbukaan informasi. Selain itu, perlu adanya pengawasan ketat terhadap laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan guna memastikan akurasi dan integritas data. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif, perangkat daerah juga harus diberdayakan agar memahami pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan publik, serta Inspektorat harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses informasi yang lebih efisien dan real-time.

3. Tuntutan Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.

Kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Pengembangan kompetensi teknis dan penguatan integritas perlu menjadi prioritas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal. Namun, tuntutan peningkatan kompetensi dan integritas SDM juga menghadirkan sejumlah risiko. Salah satunya adalah risiko kurangnya pelatihan atau pengembangan yang tepat dan berkelanjutan bagi pegawai, yang dapat menyebabkan kesenjangan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, terdapat risiko lemahnya pengawasan internal terhadap integritas SDM, yang dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika kerja. Risiko lain yang muncul adalah potensi rotasi atau pergantian personel yang tidak terencana, sehingga memengaruhi kontinuitas dan efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, Inspektorat perlu menyusun program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kompetensi teknis dan etika kerja. Pengawasan internal harus diperkuat dengan penerapan sistem audit internal berkala serta pemberian reward bagi pegawai yang menunjukkan integritas dan kinerja yang baik. Selain itu, perlu ada mekanisme rotasi yang terstruktur dan transparan, disertai dengan strategi untuk memastikan kelangsungan tugas pengawasan tetap berjalan dengan optimal.

4. Tuntutan Adaptasi dan Penerapan Teknologi Informasi.

Teknologi informasi membuka peluang besar untuk digitalisasi pengawasan dan pelaporan, namun juga menuntut Inspektorat untuk beradaptasi dengan cepat. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi, tetapi memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur yang memadai. Namun, adaptasi dan penerapan teknologi informasi juga menghadirkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Salah satu risiko utamanya adalah kurangnya kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem digital yang baru, yang dapat menghambat efektivitas implementasi teknologi tersebut. Selain itu, ada risiko keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerapan sistem pengawasan berbasis digital. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian

utama, karena sistem digital rentan terhadap serangan siber atau kebocoran informasi jika tidak dilindungi dengan baik. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu melakukan pelatihan intensif bagi pegawai terkait penggunaan teknologi informasi serta memperkuat infrastruktur teknologi yang diperlukan. Selain itu, pengembangan sistem keamanan siber yang kuat dan penerapan protokol keamanan data yang ketat sangat penting untuk melindungi informasi yang dikelola. Inspektorat juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah mendukung digitalisasi pengawasan secara merata dan efektif.

5. Tuntutan Peningkatan Integritas dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Pengawasan internal harus ditingkatkan untuk lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan. Inspektorat perlu memperkuat kapasitas manajemen risiko dan memastikan adanya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Namun, tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan juga menimbulkan sejumlah risiko. Salah satu risiko utamanya adalah potensi resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat memengaruhi kerjasama dan komitmen dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu, ada risiko kurangnya kemampuan Inspektorat dalam mendeteksi penyimpangan secara dini akibat keterbatasan sumber daya atau alat pendeteksi yang tidak memadai. Risiko lain adalah potensi tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan tata kelola, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian atau hambatan dalam proses pemerintahan. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu memperkuat sistem manajemen risiko dengan melakukan pemantauan yang rutin dan menyeluruh. Diperlukan juga peningkatan kapasitas SDM dalam mendeteksi potensi penyimpangan melalui pelatihan manajemen risiko yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu ada pendekatan yang lebih kolaboratif dengan seluruh perangkat daerah untuk menciptakan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi, serta memastikan bahwa fungsi pengawasan sejalan dengan praktik tata kelola yang baik tanpa menimbulkan konflik atau hambatan.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan akhir tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut antara lain :

1. kesadaran para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan dan implementasi RB dan Manajemen Risiko;
2. kurangnya perhatian dan tanggapan Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional serta terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya;
3. kualitas, kuantitas dan integritas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tenaga pengawas yang profesional;
4. sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha dengan optimal untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Kemudian selain isu dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa tantangan dan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Tantangan :

a. Perubahan Dinamika Regulasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang dinamis dan memastikan setiap perubahan tersebut diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

b. Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kritis

Masyarakat semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga Inspektorat Kabupaten Wonogiri dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tata kelola yang baik dan bersih. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan

mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

c. Penguatan Peran Pengawasan yang Efektif

Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu meningkatkan peran pengawasannya untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

d. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Informasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan yang lebih efisien dan transparan.

e. Mendorong Budaya Kerja yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Salah satu tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah mendorong terwujudnya budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini mencakup upaya untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, meningkatkan etika pelayanan publik, serta memperkuat komitmen seluruh aparatur terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

f. Penurunan Kuantitas SDM

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah dampak dari regulasi terkait perampangan struktur organisasi yang berimplikasi pada penurunan jumlah sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ini menyebabkan keterbatasan dalam jumlah auditor, pejabat fungsional, serta tenaga pendukung lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan, dan pengendalian intern, terutama dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang.

Dalam situasi ini, Inspektorat dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, serta mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas pegawai agar tetap mampu menjawab tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat.

2. Peluang :

a. Pemanfaatan Teknologi

Dengan digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta keterbukaan informasi publik.

b. Penguatan Kapasitas SDM

Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, maupun adopsi teknologi, yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pengawasan.

c. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih memberikan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

d. Peningkatan Peran dalam Reformasi Birokrasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dengan mengedepankan pengawasan dan evaluasi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah daerah secara keseluruhan.

e. Kolaborasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan instansi terkait, menciptakan pengawasan internal yang lebih terintegrasi, serta memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain memahami isu, permasalahan serta tantangan dan peluang yang ada, perlu diuraikan juga beberapa dampak yang mungkin terjadi jika Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapi berbagai tantangan, isu dan permasalahan tersebut, yaitu :

1. jika tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi APIP, cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK RI);
2. tanpa adanya dukungan dan arahan dari pimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja APIP sehingga tidak ada konsistensi dalam upaya pencapaian target kinerja.

2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahun. Renja 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Disamping itu, dokumen Renja tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, rencana capaiannya dan pendanaan/pagu indikatifnya. Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Program dan kegiatan tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rancangan awal Renja yang akan dilaksanakan di tahun 2026 yang masih mendasarkan pada Renstra periode tahun 2021-2026 saat penyusunannya. Kemudian pada tahapannya mengalami perubahan dari rancangan awal Renja sampai dengan rancangan akhir pada pagu anggaran karena adanya *refocussing* anggaran serta perubahan atas beberapa indikator dan targetnya menyesuaikan Renstra Baru periode 2025-2029. Perubahan ini terjadi secara rinci ditampilkan sebagaimana pada tabel 2.3.

Kemudian, beberapa strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2026 sebagai berikut :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan upaya rekrutmen SDM baru dan mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan fungsional terutama sertifikasi auditor, sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional;
2. mengupayakan peningkatan kesadaran para Pimpinan OPD dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah, melalui wahana sosialisasi dalam setiap kesempatan rapat dinas dan koordinasi;
3. upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan;
4. penguatan budaya pengendalian intern dan tindak lanjut temuan; dan
5. peningkatan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya seperti KPK, BPKPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan yang lainnya;

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					Rp 10.407.294.759					Rp 8.555.720.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				Rp 9.532.794.759	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	Rp 8.005.981.160	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp4.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100%	Rp 1.927.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 987.000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp 940.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Disusun	100%	Rp 8.678.613.759	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2	Rp 7.281.701.000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Rp 8.676.613.759	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Rp 7.279.649.000	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp 1.026.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Rp1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Rp 1.026.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp 1.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan administrasi BMD	100%	Rp 462.500	
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp 1.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp 462.500	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Disusun	100%	Rp 183.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%	Rp 165.122.500	
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Rp2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Rp 1.040.000	
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Rp 1.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Rp 1.040.000	
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Rp181.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Rp 163.042.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 198.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%	Rp 126.592.810	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp 2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp 2.867.200	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp 65.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp 49.919.510	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp 2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp 1.975.200	
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp 20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp 19.999.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Rp 12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Rp 9.976.000	
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Rp 95.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp 40.054.000	
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Rp 1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Rp 955.000	
5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp 1.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp 846.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 63.381.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	100%	Rp 60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Rp 63.381.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Rp 60.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 250.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 242.133.000	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Rp 2.000.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp 53.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Rp 47.300.000	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp 193.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Rp192.833.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 154.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 128.042.350	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp 20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp 20.680.350	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Rp 125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Rp 82.180.000	
8.3	Pemeliharaan Mebel	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Rp 2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Rp 990.000	
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp 17.160.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp 7.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp 7.032.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Rp 503.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Rp 289.915.512	
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	136 Laporan	Rp 283.500.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	100%	Rp 132.760.750	
9.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9	Rp 45.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9	Rp 17.836.250	
9.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Rp 30.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3	Rp 10.195.000	
9.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53	Rp 7.500.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53	Rp 7.488.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Rp8.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Rp 7.981.250	
9.5	Pengawasan Desa	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	Rp112.000.000	Pengawasan Desa	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22	Rp 49.772.500	
9.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	1	Rp1.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	1	Rp 1.025.500	
9.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37	Rp 80.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37	Rp 38.461.500	
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	117 Laporan	Rp 220.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	100%	Rp 157.154.762	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
10.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Rp 10.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Rp 1.095.000	
10.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	115	Rp 210.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	130	Rp 156.059.762	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rp 371.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rp 259.823.328	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	12 Laporan	Rp 30.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	1 Dokumen	Rp 15.993.920	
11.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rp 2.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rp 1.000.170	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
11.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10	Rp 28.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rp 14.993.750	
12	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	9 Laporan	Rp 340.500.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	100%	Rp 243.829.408	
12.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Rp 28.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Rp 22.132.500	
12.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Rp 10.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Rp 3.535.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
12.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Rp 300.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Rp 214.162.518	
12.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	Rp 2.500.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	Rp 3.998.890	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders karena tidak ada program/ kegiatan yang berkaitan langsung antara kegiatan masyarakat dengan tugas-tugas di bidang pengawasan/ pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi ujung tombak implementasi berbagai program menuju Indonesia Emas 2045. Penyusunannya mengacu pada arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2024, evaluasi kebijakan 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sekaligus isu-isu strategis dan kesinambungan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, tema RKP 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi: 5,80 - 6,30 %
2. Gross National Income (GNI) per kapita: USD 5.870
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK: 37,14 %
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67
5. Tingkat Kemiskinan: 6,5 – 7,5 %
6. Indeks Rasio Gini: 0,377 – 0,380
7. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,44 - 4,96 %
8. Kemiskinan Ekstrem: 0,0 – 0,5 %
9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 0,57

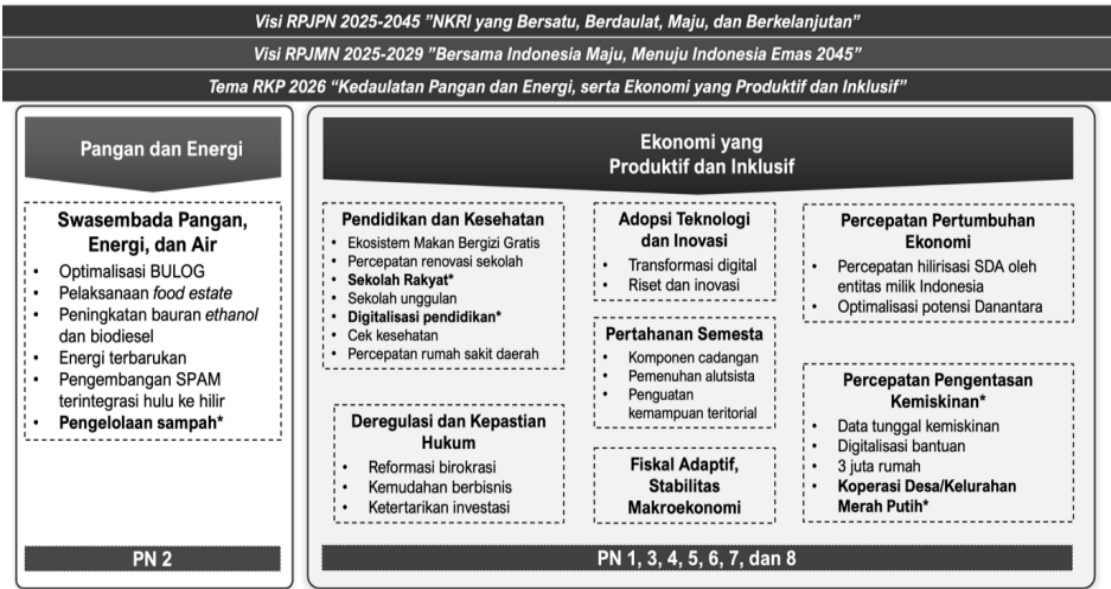


Gambar III.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026

Untuk memperkuat pijakan pencapaian sasaran tersebut, RKP 2026 menetapkan Prioritas Pembangunan sebagai panduan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, diantaranya adalah :

1. Swasembada Pangan, Energi dan Air, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air;
2. Pendidikan dan Kesehatan, meningkatkan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan bermutu, vokasi, dan pelatihan keterampilan;
3. Deregulasi dan Kepastian Hukum, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan guna memperkuat akuntabilitas dan mutu layanan publik;
4. Adopsi Teknologi dan Inovasi, mempercepat transformasi digital pada sektor publik dan ekonomi;
5. Pertahanan Semesta, diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan kemampuan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional dari gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional;
6. Fiskal Adaptif, Stabilitas Makro Ekonomi
7. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, mendorong ekonomi produktif dan inklusif melalui hilirisasi industri, UMKM, dan program padat karya;
8. Percepatan Pengentasan Kemiskinan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui program bantuan sosial terintegrasi;



Gambar III.2
Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026

Program pembangunan pada RKP 2026 dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional sekaligus mendorong ekonomi yang produktif dan inklusif, dengan penguatan mekanisme pengawasan agar setiap kebijakan dan anggaran dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kemudian dalam rangka mendukung Tema RKP 2026, Kedaulatan Pangan & Energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif, Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pendukung Misi Ketiga dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik” sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri akan mengokohkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperkuat SPIP untuk mendukung pencapaiannya dengan tujuan dan sasaran yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Sub Bab 3.2.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan untuk mendukung misi ketiga Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”.

Berdasarkan pada misi ketiga Kabupaten Wonogiri diatas, maka ditetapkan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu “Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan”.

Dengan mendasarkan misi ketiga Kepala Daerah dan tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditetapkan 2 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan
2. Meningkatnya kinerja Inspektorat

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pertama Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu “Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan” yang didukung dengan sasaran meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan strategi sebagai berikut :

1. peningkatan peran APIP dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dengan arah kebijakannya adalah mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai *consultant* dan *quality assurance*;
2. peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan dengan arah kebijakannya adalah mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten, dan
3. optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern dengan arah kebijakannya mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai target kinerja, tujuan, dan sasaran periode 2025–2029, pada tahun 2026 ditetapkan 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan, baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi pagu indikatif pendanaan serta rencana target capaian untuk tahun 2026. Data tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPD-RI sebagai Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						8.555.720.000,00							11.543.425.225,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8.555.720.000,00							11.543.425.225,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						8.555.720.000,00							11.543.425.225,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.005.981.160,00						-	10.581.475.225,00	
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	-			100 persen	1.927.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 persen	4.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	987.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	5 Dokumen	2.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	940.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Laporan	2.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			2 Dokumen	7.281.701.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Dokumen	9.546.475.135,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	7.279.649.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	40 Orang/bulan	9.544.275.135,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.026.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Laporan	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	1.026.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	13 Laporan	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah	-			100 Persen	462.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 persen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	462.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	5 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	-			100 Persen	165.122.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 persen	207.020.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	24 Dokumen	2.200.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	4 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	163.042.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	50 Orang	199.320.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-			100 Persen	126.592.810,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	276.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.867.200,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.919.510,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	71.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.975.200,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	2.200.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	0 Paket	55.000.000,00	INSPEKTORAT
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0	10.581.475.225,00	-
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	41	38	38	39							40		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	80,25	80,25	81							81,5		
			Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	100	100	100							100		
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.999.900,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	22.000.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	0 Dokumen	3.300.000,00	INSPEKTORAT
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	9.976.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	13.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	40.054.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	104.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	955.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	846.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	-			100 Persen	60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	82.920.090,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	60.000.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	6 Unit	69.720.090,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Unit	13.200.000,00	INSPEKTORAT
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	-			100 Persen	242.133.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	285.560.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	4.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	47.300.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	58.960.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	0 Laporan	9.900.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	192.833.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	212.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	-			100 Persen	128.042.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	177.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.680.350,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Unit	22.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	82.180.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	11 Unit	137.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	990.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	3 Unit	2.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	17.160.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	10 Unit	7.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.032.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Unit	7.700.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						289.915.512,00						-	553.850.000,00	
		[Menurutnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	90	78.99	85	86	289.915.512,00	-	-	-	-	-	87	553.850.000,00	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	-			100 Persen	132.760.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	100 Persen	311.850.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	17.836.250,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	9 Laporan	49.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				3 Laporan	10.195.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	3 Laporan	33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				53 Laporan	7.488.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	53 Laporan	8.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	7.981.250,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	1 Laporan	8.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				22 Laporan	49.772.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	22 Laporan	123.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1.025.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	1 Kesepakatan	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				37 Dokumen	38.461.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	37 Dokumen	88.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	-			100 Persen	157.154.762,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	100 Persen	242.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	1.095.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	2 Laporan	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				130 Laporan	156.059.762,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	130 Laporan	231.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						259.823.328,00						-	408.100.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi]	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	100	100	100	100	259.823.328,00	-	-	-	-	-	100	408.100.000,00	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	-			1 Dokumen	15.993.920,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Dokumen	33.550.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	1.000.170,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Rekomendasi	2.750.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi dasi	14.993.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Rekomendasi dasi	30.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	-			100 Persen	243.829.408,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	100 Persen	374.550.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				53 perangkat daerah	22.132.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	53 Perangkat Daerah	30.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				53 perangkat daerah	3.535.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	53 Perangkat Daerah	11.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	214.162.518,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	5 Kegiatan	330.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				53 perangkat daerah	3.998.890,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	53 Perangkat Daerah	2.750.000,00	INSPEKTORAT	
	J U M L A H							8.555.720.000,00							11.543.425.225,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui cascading di Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk periode 2025–2029, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Setiap unsur tersebut dilengkapi indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian sasaran.

Sebagaimana dijelaskan di Bab III, dokumen Renja Tahun 2026 ini memuat hasil input pada SIPD RI. Kemudian di Bab IV akan disajikan rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang selaras dengan Renstra Baru periode 2025–2029, mengingat pelaksanaan dan realisasi anggaran tahun 2026 harus didasarkan pada kerangka strategis terbaru.

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat tahun 2026 sebagaimana ditampilkan pada lampiran dokumen ini.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan dalam 3 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan uraiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program ini didukung dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 8.005.981.160,00. Berikut adalah penjelasan atas 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan tersebut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 1.927.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan targetnya 5 Dokumen yaitu Renja, RKA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Penetapan, dan DPA Perubahan dengan pendanaan sebesar Rp 987.000,00.

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan targetnya 1 Laporan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dengan pendanaan sebesar Rp 940.000,00.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dengan target 2 dokumen dan pendanaan sebesar Rp 7.281.701.000,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan targetnya 40 orang/bulan dengan pendanaan sebesar Rp 7.279.649.000,00.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan targetnya 1 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 1.026.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan targetnya 13 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 1.026.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase layanan administrasi BMD dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 462.500,00 yang didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik. Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen dengan targetnya 5 Dokumen yaitu 1 Dokumen Perencanaan, 2 Dokumen Pengamanan dan 2 Dokumen Rekonsiliasi. Pendanaan atas sub kegiatan ini sebesar Rp 462.500,00.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 165.122.500,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan targetnya 24 Dokumen Pendataan dan Pengolahan atas Administrasi Kepegawaian dengan pendanaan sebesar Rp 1.040.000,00.

2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan targetnya 4 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 1.040.000,00.

3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan targetnya 50 Orang dengan pendanaan sebesar Rp 163.042.500,00.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah dengan target

100% dan pendanaan sebesar Rp 126.592.810,00 yang didukung dengan 10 sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 2.867.200,00.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 49.919.510,00.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 1.975.200,00.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 19.999.900,00.
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 9.976.000,00.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 40.054.000,00.
- 7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan targetnya 2 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 955.000,00.

- 8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 846.000,00.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 60.000.000,00 yang didukung dengan 1 sub kegiatan untuk di tahun 2026 yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan targetnya 6 Unit yang akan digunakan untuk pembelian 4 Unit Laptop dan 2 Unit Printer dengan pendanaan sebesar Rp 60.000.000,00.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 242.133.000,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 47.300.000,00.

 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

dengan targetnya 2 Laporan (per Semester) dengan pendanaan sebesar Rp 192.833.000,00.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 128.042.350,00 yang didukung dengan 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan targetnya 2 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 20.680.350,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan targetnya 11 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 82.180.000,00.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan targetnya 3 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 990.000,00.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan targetnya 10 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 17.160.000,00.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan targetnya 1 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 7.032.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 289.915.512,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 132.760.750,00 yang didukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan targetnya 9 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 17.836.250,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan audit kepatuhan/ketaatan.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan targetnya 3 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 10.195.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Asistensi LKPD sebanyak 1 laporan, Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas LKPD sebanyak 1 laporan, dan Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD sebanyak 1 Laporan.

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan targetnya 53 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 7.488.750,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD sebanyak 28 laporan dan evaluasi SAKIP Kecamatan sebanyak 25 laporan.

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan targetnya 1 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 7.981.250,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah

pelaksanaan reviu LKPD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 laporan.

5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dengan targetnya 22 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 49.772.500,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Audit Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Desa sesuai analisis risiko pada desa di Kabupaten Wonogiri sebanyak 22 laporan.

6) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan targetnya 1 Kesepakatan dengan pendanaan sebesar Rp 1.025.500,00.

7) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan targetnya 37 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 38.461.500,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebanyak 30 dokumen, Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan (Ikhtisar Semester I dan II) sebanyak 2 dokumen, Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 dokumen, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 dokumen dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 2 dokumen.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan target 132 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 157.154.762,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 1.095.000,00.

2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan targetnya 130 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 156.059.762,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini beberapa diantaranya adalah pengawasan terkait Pemeriksaan Saldo Kas, Reviu DAK, Reviu Rancangan Akhir Renja OPD, Monitoring Evaluasi Gender, Reviu RKA, Reviu RKPD, Probitiy Audit, Pengawasan atas Urusan Pemerintahan, Reviu PAPBJ, Reviu KUA PPAS, Penanganan Aduan/Kasus dan Pengawasan Mandatori lainnya diluar pengawasan reguler yang ditujukan khusus pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

Indikator program ini adalah Persentase rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang ditindaklanjuti dengan target 100% (didukung oleh kegiatan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan) dan Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas dengan target 100% (didukung oleh kegiatan Pendampingan dan Asistensi). Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 259.823.328,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 15.993.920,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun targetnya 1 Rekomendasi dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan tahunan dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.170,00.

2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun dengan targetnya 1 Rekomendasi yang digunakan untuk memfasilitasi dalam penyusunan kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) setiap tahunnya dengan anggaran pendanaan sebesar Rp 14.993.750,00.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan dengan targetnya 100% dengan pendanaan sebesar Rp 243.829.408,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan targetnya 53 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 22.132.500,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan dalam Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi beserta Penjaminan Kualitasnya termasuk di dalamnya pendampingan dan asistensi penyusunan Register Risiko (RR) bagi semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri sebanyak 53 perangkat daerah.

2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,

dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan targetnya 53 perangkat daerah yang dicapai dengan pelaksanaan Evaluasi Internal RB secara triwulanan dengan pendanaan sebesar Rp 3.535.500,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan targetnya 5 kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 214.162.518,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan atas *monitoring* MCSP, Pengendalian Gratifikasi, *monitoring* Survei Penilaian Integritas (SPI), Pendampingan Perluasan Desa Anti Korupsi, *monitoring* dan evaluasi FCP.

4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan targetnya 53 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 3.998.890,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada semua perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 53 perangkat daerah melalui pengumpulan Bukti Setor Pajak (SPT) bagi LHKAN dan bukti lapor kekayaan bagi LHKPN serta *monitoring* dan pembangunan Zona Integritas (ZI).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2026. Penyusunan Renja tahun 2026 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan. Kemungkinan atas perubahan yang terjadi dalam upaya pencapaian sasaran utama pelaksanaan pengawasan, diharapkan seluruh unsur di Inspektorat Kabupaten Wonogiri tetap menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama aktivitas pengawasan tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun laporan hasil pengawasan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga program dan kegiatan di Inspektorat yang sudah direncanakan diharapkan tetap dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. melaksanakan Renja 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan kewenangan organisasi;

- b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. dalam rangka efektivitas pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala melalui laporan bulanan atas capaian target kinerja dan laporan triwulanan atas monitoring evaluasi Perjanjian Kinerja (PK).

5.3. Manajemen Risiko

Dalam uraian bab-bab sebelumnya telah menguraikan latar belakang penyusunan Renja, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya sampai dengan penetapan tujuan dan sasaran yang kemudian dioperasionalkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya. Namun, hal tersebut masih berupa perencanaan yang tentunya memiliki risiko yang memiliki kemungkinan untuk menghambat ketercapaian sehingga harus dilakukan pemetaan risiko operasionalnya agar dapat dilakukan langkah pengendalian.

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko prioritas dan penyusunan rencana tindak pengendalian. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks operasional perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 untuk Manajemen Risiko Operasional berikut ini :

Tabel 5.1
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional
Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026

Program	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan tidak segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Komitmen perangkat daerah kurang keterbatasan sumber daya, dan masih lemahnya monitoring	Perbaikan tata kelola tidak optimal dan terjadi risiko berulang	12	Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut secara Rutin Berkala	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi dalam Pengendalian Intendan Penguatan Integritas	Pelaksanaan pendampingan dan asistensi tidak sepenuhnya efektif dalam Pengendalian Intendan Penguatan Integritas	Perumusan tujuan dan rekomendasi tidak sepenuhnya tepat	Tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja daerah	9	Peningkatan kompetensi SDM dan revidi bejenjang	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Pengembangan inovasi perangkat daerah belum berjalan optimal	Kurangnya budaya inovasi	Kualitas pelayanan publik stagnan	12	Mengoptimalkan implementasi agen perubahan	Sekretaris	Triwulan IV
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Belum semua target kinerja tercapai sesuai rencana	Monitoring dan evaluasi internal belum berjalan optimal	Target kinerja tidak tercapai sesuai rencana	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat capaian kinerja berkala	Sekretaris	Triwulan IV

Program	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Implementasi tata keba organisasi belum sepenuhnya sesuai SOP	Pemahaman aparatur terbatas dan komitmen belum merata	Efektivitas organisasi tidak tercapai	9	Sosialisasi SOP minimal 1 kali dalam setahun	Sekretaris	Triwulan IV
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	Pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	SOP yang dimiliki belum lengkap	Informasi dalam laporan menjadi tidak relevan untuk pengambilan keputusan	9	Cukup dikeba dengan pengendalian yang ada melalui rapat capaian kinerja berkala	Sekretaris	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal tidak sesuai jadwal rencana tahunan b. Terjadinya gratifikasi/ suap dalam pengawasan intern	a. Permintaan pemeriksaan mendadak di luar rencana tahunan b. Kurangnya integritas	a. Pengawasan terlambat dari yang direncanakan dan kinerja tidak tercapai tepat waktu b. Mengurangi kepercayaan publik dan terjadinya kasus korupsi	12 12	a. Cukup dikeba dengan pengendalian yang ada melalui rapat operasional bulanan untuk menentukan prioritas pengawasan bulanan b. Pembaharuan penandatanganan pakta integritas	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan	a. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan	a. Permintaan pemeriksaan mendadak di luar rencana	a. Pengawasan terlambat dari yang direncanakan	12	a. Cukup dikeba dengan pengendalian yang ada melalui rapat	Inspektur Pembantu	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
	tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	tertentu tidak tepat waktu sesuai rencana tahunan b. Terjadinya gratifikasi/ Suap dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	tahunan b. Kurangnya integritas	b. Mengurangi kepercayaan publik dan terjadinya kasus korupsi	12	operasional bulanan untuk menentukan prioritas pengawasan bulanan b. Pembaharuan penandatanganan pakta integritas		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Penyusunan dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan pengawasan	Ketersediaan data risiko terbatas karena kapasitas perencanaan belum optimal	Tujuan pengawasan tidak efektif	12	a. Membrong percepatan penyusunan RR dan RIP Renda/OPD b. Rakor penyusunan RKPT Berbasis Risiko	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	Perumusan tujuan dan ruang lingkup dalam pengurusan pendampingan dan asistensi belum tepat	Pemahaman pengawas yang masih kurang	Pendampingan dan asistensi tidak memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan	9	Peningkatan kompetensi SDM	Inspektur Pembantu	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Keselarasan antar dokumen masih belum sesuai	Lemahnya koordinasi	Dokumen tidak dapat menjadi dasar penentuan keputusan secara efektif	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	a. Aktivitas pengeluaran / belanja tidak didukung dengan dokumen pertanggung jawaban b. Penyalahgunaan kewenangan dalam pencarian	Lemahnya pengendalian internal	a. Pertanggung jawaban keuangan tidak akurat dan akuntabilitas tidak terjaga b. Terjadinya tindak korupsi	6	a. Pembinaan integritas secara berkala b. Peningkatan kompetensi/ pemahaman sistem pengendalian intern keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah	a. Data aset tidak dilakukan pembaharuan b. Hilangnya aset secara ilegal	a. Monitoring tidak dilakukan secara berkala b. Pengamanan aset belum optimal	a. Ketidaksiapan laporan Barang Milik Daerah b. Kerugian daerah	6 9	- Cukup dikebla dengan pengendalian yang ada dengan penandatanganan pakta integritas penggunaan dan bertanggung jawab Barang Milik Daerah setiap tahun	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak sesuai standar pelayanan	Keterlambatan input data kepegawaian	Keterlambatan layanan kepegawaian	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai kebutuhan	Identifikasi kebutuhan belum dilakukan secara rinci	Pelayanan administrasi umum lambat	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah	Adanya kolusi antara rekanan dan perangkat PBJ	Kurangnya integritas pegawai	Kerugian keuangan daerah	9	Cukup dikebla dengan pengendalian yang ada terkait pakta integritas dan kode etik	Kepala Sub Bagian Umum dan	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
pemerintah daerah	penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset						Kepegawai an	
Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan tidak dikelola tepat waktu	Identifikasi kebutuhan jasa dan belanja operasional belum akurat	Menghambat layanan penyediaan jasa penunjang (termasuk jasa surat menyurat, pembayaran tagihan bulanan, pembayaran gaji non-ASN, serta pemeliharaan perabot kantor)	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Triwulan IV
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Pemeliharaan barang milik daerah belum optimal	Identifikasi pemeliharaan barang belum memadai	Menghambat tugas-tugas operasional kantor	9	Menyusun jadwal pemeliharaan rutin	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Triwulan IV

5.4. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

TTD

MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199903 1 002

LAMPIRAN

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. WONOGIRI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						8.555.720.000,00							11.543.425.225,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8.555.720.000,00							11.543.425.225,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						8.555.720.000,00							11.543.425.225,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.005.981.160,00						-	10.581.475.225,00	
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	-			100 persen	1.927.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 persen	4.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	987.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	5 Dokumen	2.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	940.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Laporan	2.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			2 Dokumen	7.281.701.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Dokumen	9.546.475.135,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	7.279.649.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	40 Orang/bulan	9.544.275.135,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.026.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Laporan	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	1.026.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	13 Laporan	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah	-			100 Persen	462.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 persen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	462.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	5 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	-			100 Persen	165.122.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 persen	207.020.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	24 Dokumen	2.200.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	4 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	163.042.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	50 Orang	199.320.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-			100 Persen	126.592.810,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	276.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.867.200,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.919.510,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	71.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.975.200,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	2.200.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	0 Paket	55.000.000,00	INSPEKTORAT
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0	10.581.475.225,00	-
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	41	38	38	39							40		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	80,25	80,25	81							81,5		
			Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	100	100	100							100		
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	19.999.900,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Paket	22.000.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	0 Dokumen	3.300.000,00	INSPEKTORAT
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0	10.581.475.225,00	-
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	41	38	38	39							40		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	80,25	80,25	81							81,5		
			Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	100	100	100							100		
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	9.976.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	13.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	40.054.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	104.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	955.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	846.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	-			100 Persen	60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	82.920.090,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	60.000.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	6 Unit	69.720.090,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Unit	13.200.000,00	INSPEKTORAT
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0	10.581.475.225,00	-
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	41	38	38	39							40		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	80,25	80,25	81							81,5		
			Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	100	100	100							100		
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	-			100 Persen	242.133.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	285.560.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	4.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	47.300.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	58.960.000,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	-	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	0 Laporan	9.900.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	1 41 82,5 100	1 38 80,25 100	1 38 80,25 100	1 39 81 100	8.005.981.160,00	-	-	-	-	-	0 40 81,5 100	10.581.475.225,00	-
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	192.833.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Laporan	212.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	-			100 Persen	128.042.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	177.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.680.350,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Unit	22.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	82.180.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	11 Unit	137.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	990.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	3 Unit	2.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	17.160.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	10 Unit	7.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	7.032.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Unit	7.700.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						289.915.512,00						-	553.850.000,00	
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	90	78.99	85	86	289.915.512,00	-	-	-	-	-	87	553.850.000,00	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	-			100 Persen	132.760.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	100 Persen	311.850.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				9 Laporan	17.836.250,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	9 Laporan	49.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				3 Laporan	10.195.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	3 Laporan	33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				53 Laporan	7.488.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	53 Laporan	8.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	7.981.250,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	1 Laporan	8.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				22 Laporan	49.772.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	22 Laporan	123.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1.025.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	1 Kesepakatan	1.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				37 Dokumen	38.461.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	37 Dokumen	88.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	-			100 Persen	157.154.762,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	100 Persen	242.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				2 Laporan	1.095.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	2 Laporan	11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				130 Laporan	156.059.762,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	130 Laporan	231.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						259.823.328,00						-	408.100.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas pendampingan dan asistensi]	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	100	100	100	100	259.823.328,00	-	-	-	-	-	100	408.100.000,00	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	-			1 Dokumen	15.993.920,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Dokumen	33.550.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1.000.170,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Rekomendasi	2.750.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomen dasi	14.993.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Rekomen dasi	30.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	-			100 Persen	243.829.408,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	100 Persen	374.550.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				53 perangkat daerah	22.132.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintah an yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	53 Perangkat Daerah	30.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				53 perangkat daerah	3.535.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	53 Perangkat Daerah	11.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	214.162.518,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	5 Kegiatan	330.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				53 perangkat daerah	3.998.890,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	53 Perangkat Daerah	2.750.000,00	INSPEKTORAT	
	J U M L A H							8.555.720.000,00							11.543.425.225,00		